

Pernikahan Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Rasyid Ridha)

Oleh : Uup Gufron

Abstrak

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah dan Rasyid Ridha dalam melihat persoalan pernikahan beda agama. Hingga saat ini persoalan tersebut masih sangat diperbincangkan karena di Indonesia sendiri tidak mengakomodir jenis pernikahan tersebut. Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Rasyid Ridha cenderung berseberangan ketika menafsirkan makna ahl al-kitab. Ibnu Taimiyah berkesimpulan bahwa ahl al-kitab yang boleh dinikahi adalah yang tidak musyrikat (musyrik), meskipun ia Yahudi maupun Nasrani. Sedangkan Rasyid Ridha berpandangan bahwa ahl kitab adalah orang yang berpegang teguh pada kitab suci, baik Yahudi, Nasrani, maupun agama lain.

Kata Kunci: *nikah, beda agama, ahl alkitab*

PENDAHULUAN

Orang Indonesia bisa dibilang beragam. Masyarakatnya sangat majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis, suku bangsa dan agama. Terutama dalam menjalani kehidupan yang dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam, hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama menjadi lebih dinamis dan toleran.

Laki-laki muslim dan dan perempuan muslim saat ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-Muslim. Hal ini tentu saja dianggap sebagai penyalahan atau pergeseran nilai-nilai Islam yang ada. Tak jarang hal ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat yang mempunyai ideologi radikal terhadap agama. Perkawinan pemeluk antar agama masih terjadi seiring dengan pergaulan masyarakat yang heterogen. Banyak kasus nikah beda agama yang terjadi dalam masyarakat Indonesia seperti perkawinan artis Jamal Mirdad (muslim) dengan Lidiya Kandau (Kristen), Ari Sihasale (Kristen) dengan Nia Zulkarnain (Muslimah), Ina Indahyati (muslimah) dengan Jeremy Thomas (Kristen) yang akhirnya Ina masuk agama Kristen, dan banyak lagi yang lainnya.

Padahal, pernikahan adalah persoalan penting dalam kehidupan beragama. Karena sifatnya bukan hanya sekedar ikatan permuamalatan (*bottom up*) namun juga persoalan ibadah (*top down*) sehingga Islam mendefinsikan perkawinan dengan istilah *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat baik dengan sesama manusia maupun ikrar janji setia kepada Allah). Secara sosio-antropologis manusia hidup saling membaur antara satu dengan yang lainnya, tumpah ruah menjadi satu baik yang berbeda ras maupun yang berbeda agama dan secara naluriah mereka saling berpasangan.

Di kalangan ulama sendiri, pernikahan beda agama masih terjadi silang pendapat. Secara umum terbelah menjadi dua, yakni yang setuju atau membolehkan dan yang tidak setuju atau mengharamkan. Salah satu yang membolehkan adalah Rasyid Ridho. Dengan catatan bahwa pernikahan itu terjadi antara muslim laki-laki dan wanita non-muslim yang tergolong *ahl al-kitab*, yaitu yang masih memiliki dan mempercayai kitab suci, baik Yahudi, Nasrani, maupun agama lain. Namun, di sisi lain, Ibnu Taimiyah secara eksplisit mengharamkan, meskipun boleh menikahi wanita *ahl al-kitab*. Karena pada kenyataannya, wanita ahl al-kitab

saat ini tidak mungkin bisa ditemukan. *Ahl al-kitab* saat ini tergolong *musyrikat*, atau wanita yang musyrik karena sudah tidak lagi mempercayai kitab suci Injil dan Taurat yang asli atau otentik.

Baik Ibnu Taimiyah maupun Rasyid Ridho menarik untuk dikaji pendapatnya karena kedua ulama ini menjadi rujukan penting bagi umat Islam di Indonesia. Alasan lain untuk mengkaji pendapat kedua ulama ini dikarenakan keduanya mengambil metode penetapan hukum yang berbeda dalam memahami ayat al-Quran yang sama.

SILANG PENDAPAT

Persoalan pernikahan selalu menarik untuk dibahas. Nikah adalah sesuatu yang tak terpisahkan dari kehidupan beragama umat Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *na-ka-ha*, yang secara linguistik bermakna *al-waṭ'u*, *ad-ḍammu*, dan *al-jam'u*. Masing-masing kata tersebut bermakna menggauli, bersetubuh, atau bersenggama.¹ Menurut al-Kahlany dan al-Jurjany, dalam kitab *Subūl al-Salām* dan kitab *al-Ta'rīfāt*, sebagaimana yang dikutip oleh Abdur Rahman, juga menyebutkan kata nikah (bahasa Arabnya *nikah*) mempunyai makna mengumpulkan atau memasukkan yang digunakan untuk arti bersetubuh atau *waṭ'i* (*coitus*).

Pernikahan bisa dibilang jalan utama yang diperintahkan Allah SWT kepada hamba-Nya agar terhindar dari perbuatan zina atau perbuatan yang mengarah kepada kesesatan. Karena akibat pengaruh nafsu yang kadang-kadang tidak dapat dikendalikan. Pernikahan tidak hanya sekedar memenuhi biologis semata, melainkan mempunyai makna manusiawi yang luhur, karena perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia berdasarkan ridho Allah SWT. Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang didambakan

oleh setiap manusia. Sebab dengan pernikahan seorang akan memenuhi tuntutan biologisnya dengan aman dan tenang, sehingga antara suami-isteri memperoleh kepuasan yang membawa ketenangan lahir dan batin dan dapat menambah rasa cinta dan kasih mengasihi antara mereka.

Secara umum, terjadinya kasus nikah beda agama di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat bentuk kasus pernikahan:

1. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*

Dalam kasus pernikahan model seperti ini, sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi mengharamkannya. Ulama yang membolehkan merujuk pada firman Allah QS. al-Maidah: 5. Allah membolehkan perkawinan pria Muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* yang *muhsanat*, yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Selain arti itu, ada juga yang memahami kata *muhsanat* ketika dirangkaikan dengan *utu al-kitab* dari ayat di atas dengan arti wanita-wanita merdeka atau wanita-wanita yang sudah kawin. Pendapat ini dikuatkan dengan pandangan bahwa beberapa sahabat dan *tabi'in* juga pernah menikah dengan wanita *ahl al-kitab*. Dari kalangan sahabat antara lain adalah 'Usman, Talhah, Ibnu 'Abbas, Jabir bin Huzaifah. Sedangkan dari kalangan *tabi'in* semisal Sa'id ibn Musayyab, Sa'id ibn Zubair, al-Hasan, Mujahid, Tawus, Ikrimah, asy-Sya'abiy dan ad-Dahhak.²

Pada sisi lain, para ulama yang mengharamkannya juga merujuk pada firman Allah QS. al-Baqarah: 221. Allah mengharamkan perkawinan antara pria Muslim dengan wanita *musyrik*, begitu juga sebaliknya, wanita muslim pun dilarang menikahi pria *musyrik*. Kelompok yang mengharamkan, mengatakan bahwa Q.S. al-Maidah: 5 tersebut di atas telah dinasakh oleh Q.S. al-Baqarah: 221.

Pendapat ini pun diperkuat dengan riwayat ketika seorang sahabat nabi, Ibnu 'Umar r.a, ketika ditanya tentang

perkawinan antara pria muslim dengan wanita *ahl al-kitab* menjawab: “*Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik dinikahi oleh orang-orang Islam dan aku tidak melihat kesyirikan yang lebih besar dari seorang wanita yang berkata: Isa adalah Tuhan, atau Tuhannya adalah seorang manusia hamba Allah*”. Dapat disimpulkan bahwa Ibnu 'Umar tidak membedakan antara *ahl al-kitab* dan *musyrik*, yakni karena *ahl al-kitab* berbuat syirik, ia juga masuk dalam kategori *musyrik*, yang haram untuk dinikahi.

Larangan dan keharaman menikahi wanita non muslim meskipun termasuk *ahl al-kitab* juga menjadi pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tahun 2005 MUI telah memfatwakan tentang keharaman menikahi wanita ahlul kitab berdasarkan pendapat yang kuat (*qaul mu'tamad*).⁴

2. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita *musyrik*

Perkawinan bentuk kedua ini umumnya disepakati oleh jumhur ulama sebagai pernikahan yang diharamkan, berdasarkan Q.S. al-Baqarah: 221: “*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.*” Ayat ini turun bertalian dengan kejadian Abi Martsad Al-Ghanawi, yang juga disebut orang Martsad Ibnu Abi Martsad, sedang namanya sendiri Kun Nas bin Hashin Al Ghanawi. Dia dikirim oleh Rasulullah secara rahasia di Makkah untuk mengeluarkan seorang sahabatnya dari sana. Sedang di Makkah pada jaman jahiliyah dulu dia punya teman perempuan yang dicintainya, namanya “Inaq”, perempuan ini lalu datang kepadanya, maka kata Martsad kepadanya: “*Sesungguhnya Islam telah mengharamkan perbuatan-perbuatan jahiliyah dulu.*” Lalu kata Inaq: “*Kalau begitu kawini saja saya.*” Jawab Martsad: “*Nanti saya minta izin dulu kepada Rasulullah.*” Lalu dia datang pada Rasulullah minta izin. Tetapi Rasulullah melarang menikahinya, sebab ia sudah Islam sedang perempuan itu masih musyrik. Atas argumentasi dua hal

tersebutlah kemudian para ulama mengharamkan menikahi wanita *musyrik*.

3. Pernikahan antara wanita muslim dengan pria *ahl al-kitab*

Adapun pernikahan bentuk ini, meskipun tidak disebutkan dalam al-Quran, menurut jumhur adalah juga diharamkan. Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan *ahl al-kitab* dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi hal ini bukan berarti ada izin untuk pria *ahl al-Kitab* menikahi wanita muslim.

4. Pernikahan antara wanita muslim dengan pria musyrik yang bukan *ahl al-kitab*.

Pernikahan bentuk keempat ini umumnya disepakati oleh jumhur ulama sebagai pernikahan yang diharamkan, berdasarkan Q.S. al-Baqarah: 221. Untuk pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan wanita muslim, ulama sepakat mengharamkan pernikahan yang terjadi pada keadaan seperti itu, seorang wanita muslim haram hukumnya dan pernikahannya pun tidak sah bila menikah dengan laki-laki non-Muslim.⁵

Dari keempat kategori kasus pernikahan beda agama tersebut dapat ditarik benang merah bahwa sebenarnya Islam masih memiliki silang pendapat soal laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim. Hanya saja perdebatannya pada persoalan istilah *ahl-kitab* dan *musyrikat*. Tetapi, persoalan sorang wanita muslim menikahi pria non-muslim, bisa dibilang sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat. Mutlak para ulama mengharamkannya. Dengan kata lain, tidak ada ruang silang pendapat soal itu.

Jika merujuk perdebatan ini dalam kaca mata pendapat ulama fiqih, maka perdebatan ini menjadi menarik ketika ulama menyebutkan siapa saja yang termasuk wanita *ahl al-kitab*. Imam Syafi'i misalnya, memahami istilah *ahl al-kitab* sebagai orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut

agama Yahudi dan Nasrani. Alasannya antara lain bahwa Nabi Musa dan Isa, hanya diutus kepada mereka, orang-orang Israel, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Selain itu, juga karena adanya redaksi *min qablikum* (sebelum kamu) pada ayat yang membolehkan perkawinan itu (Q.S. al-Maidah: 5).⁶

Di sisi lain, Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk *ahl al-kitab*. Dengan demikian, *ahl al-kitab* tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Jika ada satu kelompok yang hanya percaya pada *subuh* Ibrahim atau Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud a.s saja, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian *ahl al-kitab*. Pendapat ketiga dianut oleh sebagian kecil ulama-ulama *salaf*, yang menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci, maka mereka juga dicakup oleh pengertian *ahl al-kitab*, seperti halnya Majusi. Kemudian diperluas lagi sehingga mencakup pula penganut agama Budha dan Hindu. Tentunya pendapat-pendapat yang berbeda ini akan membawa implikasi kepada siapakah golongan yang boleh atau tidak boleh dinikahi pria Muslim.

Antara Ibnu Taimiyah dan Rasyid Ridho

Ibnu Taimiyah termasuk ulama kenamaan dari kalangan mazhab Hambali. Ia lahir di Harran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hari Senin 10 Rabiul`ul Awal tahun 661H. Ayahnya bernama Syihabuddin Abul Mahasin Abdul Halim bin Taimiyyah.⁸⁴ Ayahnya seorang syaikh, khatib hakim di kotanya. Sedangkan kakeknya, Syaikh Islam Majduddin Abu al-Birkan adalah fakih Hambali, Imam, ahli hadis, ahli-ahli ushul, nahwu seorang hafiz, dan pamannya bernama Fakhruddin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis muslim ternama.

Semenjak kecil, Ibnu Taimiyah sudah terlihat tanda-tanda kecerdasan pada diri beliau. Begitu tiba di Damsyik karena pengungsian, ia menghafal Al-Quran dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu Ushuluddin dan sudah mendalami berbagai bidang ilmu, di antaranya bidang fikih, tafsir, hadis, filsafat dan teologi.

Ibnu Taimiyah terkenal sebagai tokoh ulama pembaru (*tajdid*). Julukan yang sering dinisbatkan kepadanya adalah Syaikhul Islam. Sebagai ulama yang mempunyai pengetahuan tinggi, bahkan tidak jarang pemikirannya bertentangan dengan pendapat ulama lainnya. Terkait dengan hal tersebut, ada ulama yang memujinya, bahkan tidak sedikit ulama yang kontra terhadap pemikirannya. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Iqbal, bahwa pada tahun 705 H/1306 M, ia dijebloskan ke penjara di benteng Kairo, karena mempertanggung jawabkan tulisannya tentang sifat-sifat Tuhan, yang dinilai penguasa menimbulkan keresahan dan kerisuhan. Sebelumnya, ia juga pernah dipenjara karena pemikirannya. Meskipun beberapa kali dipenjara, namun tetap masih banyak sekali yang memberikan pujian kepada Ibnu Taimiyah bahkan yang berguru kepadanya. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Karena keilmuannya yang luar biasa, maka pemikirannya banyak ditulis dalam berbagai kitab, salah satunya adalah kitab *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*.

Julukan sebagai ulama pembaharu (*tajdid*) juga melekat pada Rasyid Ridho. Nama lengkapnya al-Sayyid Muhammad Rasyid Rida ibn Ali Rida ibn Muhammad Syamsuddin ibn al-Sayyid Baharuddin ibn al-Sayyid Munla Ali Khalifah al-Baghdadi. Ia ridho lahir pada tanggal 27 Jumada al-Ula 1282 H/ 23 September 1865M. Tapi dalam arsip kementrian dalam negeri kerajaan utsmani, ia lahir pada tahun 1279H. di al-Qalamun, disuatu desa di Libanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tarabuls Syam. Menurut keterangan, ia berasal

dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad saw. Oleh karenanya, ia memakai gelar Sayyid di depan namanya.

Semasa kecil, Rasyid Ridha dimasukkan ke madrasah tradisional di al-Qolamun untuk belajar menulis, berhitung dan membaca Al-Quran. Tahun 1299H, ia meneruskan pelajarannya di Madrasah Wataniyah yang didirikan dan dikepalai oleh ustadznya, Al-Syeikh Husein Afandi al-Jisr, di Tripoli.

Sejak remaja, Rasyid Ridho terbilang dekat dengan ide-ide pembaharu. Salah satu yang dia kagumi adalah tulisan Muhammad Abduh di majalah *Al-Urwah Al-Usqa* yang sangat menggugahnya untuk mencermati ide-ide modern. Pada saat Abduh berada di Beirut, Rasyid Ridha berkesempatan bertemu dan dialog dengan tokoh besar itu. Perjumpaan dengan Muhammad Abduh ini meninggalkan kesan mendalam pada diri Ridha, sehingga wawasannya sangat terbuka luas. Dalam perbincangan dengan Muhammad Abduh, Rasyid Ridha banyak tahu tentang keadaan Mesir yang penuh gejolak. Dan Abduh sangat berkepentingan menanamkan jiwa pembaruan kepada Ridha, agar mereka dapat memperjuangkan cita-cita Islam bukan hanya untuk rakyat Mesir melainkan juga seluruh dunia Islam. Rasyid Ridha mempunyai jiwa yang kritis dan suka mengadakan perbincangan yang mendalam terhadap suatu bidang ilmu. Ini secara tidak langsung, memang merupakan pengaruh dari pemikiran al-Afgani dan Abduh. Bagi Rasyid Ridha jelas bahwa sikap kritis intelektual perlu sakali di pupuk secara dini. Dan tantangan seperti itu pula yang mendorong untuk dapat secepatnya menebarkan benih pembaruan agar lebih meresap lagi.

Setelah dua tahun berada di Mesir kemudian ia mulai menerbitkan majalah yang termasyur, *Al-Manar*. Di dalam nomor pertama dijelaskan bahwa tujuan *Al-Manar* sama dengan tujuan *Al-Urwah Al-Wusqa*. Majalah ini juga banyak menyiarkan ide-ide Abduh. Walaupun ide dasar datang dari

sang guru namun pada hakikatnya interpretasi luas sepenuhnya dikembangkan oleh Rasyid Ridha sendiri yang kemudian menjelaskan dan menyiarkan kepada umum melalui lembaran-lembaran *Al-Manar*. Ketika Rasyid Ridha meninggal dunia dia belum sempat menyelesaikan *Tafsir Al-Manar*. Dia baru sampai menafsirkan firman Allah dalam Surat Yusuf: 101.

PEMBAHASAN

Terkait dengan pembahasan mengenai nikah beda agama, Ibnu Taimiyah sebenarnya menyatakan kebolehan menikahi wanita *ahl al-kitab* berdasarkan adanya petunjuk ayat Alquran surat al-Maidah seperti telah dijelaskan sebelumnya.⁷ Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa wanita *ahlul kitab* yang dibolehkan menikahnya berbeda dengan wanita *musyrik* yang dilarang untuk dinikahi. Terkait dengan hukum menikahi wanita *musyrik* telah digambarkan dalam surat al-Baqarah ayat 221. Namun, ketentuan ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah telah dikhususkan oleh surat al-Maidah yang turunnya lebih akhir. Untuk itu, menikahi wanita *ahl al-kitab* dibolehkan. Meskipun kebolehan menikahi wanita *ahl al-kitab* telah dijelaskan dalam al-Quran, tetapi Ibnu Taimiyah tampaknya membatasi kebolehan menikahi wanita ahl al-kitab ini.

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah memandang bahwa agama dan kitab-kitab yang diturunkan bagi umat Yahudi dan Nasrani pada dasarnya bebas dari kesyirikan. Karena asal mula agama *ahl al-kitab* tidak ada ajaran tentang *syirik*, melainkan ajaran tauhid. Untuk itu, bagi orang-orang yang beragama yahudi dan Nasrani yang kemudian mempersekutukan Allah, maka mereka dapat digolongkan kepada orang-orang *musyrik*, bukan *ahl al-kitab*. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa pandangan Ibnu Taimiyah tentang kebolehan menikahi wanita *ahl al-kitab* dalam arti wanita yang

beragama Yahudi dan Nasrani yang tidak mempersekutukan Allah.

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa kata *abl al-kitab* tidak lain diartikan hanya untuk kalangan orang-orang yang secara sosiologis, merupakan masyarakat yang mempunyai kitab suci. Dalam hal ini, hanya dikhususkan pada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, meskipun pemeluk agama lainnya juga memiliki kitab suci,⁹³ tetapi istilah *ab al-kitab* yang dipahami oleh ulama-ulama terdahulu hanya orang-orang yang diberi kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani.

Pada dasarnya, pada masa Rasulullah hidup, wanita-wanita yang dimasukkan dalam kategori *abl al-kitab* sebenarnya telah mempersekutukan Allah (*musyrik*). Mengutip penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya, "*Tghasab al-Lahfan*", bahwa upaya untuk mengubah agama Nabi Isa (al-Masih) telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Hingga, upaya tersebut terbukti dan substansi ajarannya benar-benar hilang. Di mana, orang-orang Nasrani telah mencampuradukkan agama al-Masih dengan agama para ahli filsafat penyembah berhala. Ibnu Qayyim juga menyatakan bahwa kemusyrikan orang-orang Nasrani telah terjadi sekitar 300 (tiga ratus) tahun sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Adapun agama Yahudi juga demikian, mereka telah musyrik sejak sebelum Nabi Muhammad diutus sampai sekarang.⁸

Keterangan yang menunjukkan orang *abl al-kitab* juga telah berbuat *musyrik* pada masa Rasulullah diperkuat dengan penjelasan bahwa banyak ulama terdahulu maupun kontemporer yang mengarang kitab-kitab tentang telah diubahnya Taurat dan Injil dan penyimpangan ajaran mereka menjadi ajaran *syirik*. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengubah kitab-kitab mereka sesuai dengan konsili-konsili keagamaan yang mereka adakan. Berdasarkan penejelasan ini,

dapat disimpulkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani (*ahl al-kitab*) pada masa Rasulullah juga telah berbuat musyrik.

Berangkat dari topik pembahasan ini, bahwa Ibnu Taimiyyah juga memaknai *ahl al-kitab* sebagai orang-orang yang diberi kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Namun, menurut Rasyid Ridho, *ahl al-kitab* tidak hanya sebatas dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja, melainkan semua penganut agama dan kepercayaan yang memiliki dan mempedomani salah satu kitab suci merupakan Ahli Kitab, seperti Majusi, Shabi'un, Hindu, Buda, Konghucu, Sinto, dan lain-lain. Hal ini menurutnya juga berdasarkan fakta sejarah serta penjelasan dan pernyataan dari al-Qur'an sendiri, bahwa setiap umat mempunyai rasul yang diutus kepada mereka oleh Allah SWT. Mereka juga memiliki kitab suci yang dibawa oleh nabi mereka, hanya saja terjadi penyelewengan (*tahrif*) terhadap kitab suci tersebut sebagaimana terjadi pada kitab suci Yahudi dan Nasrani. Apalagi hukum asal pernikahan menurut Rasyid Ridha adalah boleh. Oleh karena itu, datang *nash* untuk mengatur dan menjelaskan dalam hal-hal dan kasus apa saja pernikahan tersebut dilarang atau diharamkan.⁹

Berdasarkan konsep Rasyid Ridha terhadap makna *ahli al-kitab* ini, tentu saja dia membolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita *ahli al-kitab*. Kebolehananya tidak hanya dengan wanita Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga dengan wanita Majusi, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, dan penganut agama lainnya yang memiliki kitab suci. Menurut Rasyid Ridha, tidak ada perbedaan yang besar antara wanita Ahli Kitab dengan orang mukmin. Karena, wanita Ahli Kitab juga beriman kepada Allah SWT dan menyembahnya beriman kepada para nabi dan hari akhir serta balasannya, meyakini kewajiban berperilaku baik dan keharaman berbuat jahat. Hanya saja, perbedaan yang paling prinsipil antara mukmin dengan Ahli Kitab adalah keengganan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan karakteristik

tauhid dan ibadah yang dibawanya. Maka, orang yang beriman dengan kenabian secara umum, tentu saja mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Faktor yang menyebabkan mereka terhalang untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketidaktahuan mereka dengan hakikat risalah yang dibawanya, atau penentangan dan keingkaran mereka secara zahir, padahal hati nurani mereka meyakini kebenarannya.

Namun menariknya, pemaknaan *ahl kitab* menurut Ibnu Taimiyyah tampaknya dibatasi oleh ada tidaknya penggantian dan perombakan atas ajaran dari masing-masing kitab suci tersebut. Dengan kata lain, *ahl al-kitab* yang dipahami oleh Ibnu Taimiyyah yaitu *ahl al-kitab* yang masih menerapkan ajaran-ajaran asli (autentik) dari kitab suci yang dianut.¹⁰ Ibnu Taimiyyah memaknai ahlu kitab sebenarnya berangkat dari ketentuan ayat yang menyatakan bahwa antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, dipisahkan penyebutannya dengan orang Shabi'in, Majusi dan orang-orang Musyrik. Sebagaimana makna tersebut dipahami dari ketentuan Al-Qur'an Surat al-Haj ayat 17.

Meskipun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang notabene sebagai *ahl al-kitab* dipisahkan penyebutannya dengan orang-orang musyrik seperti pada ayat tersebut di atas, namun menurut Ibnu Taimiyyah mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) disifati sebagai orang-orang yang musyrik juga. Selain itu, pemaknaan *ahlul kitab* ini juga berangkat dari ketetapan Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5:

Ibnu Taimiyyah memandang makna *ahlul al-kitab* dalam ayat tersebut yaitu mereka yang agama dan kitab-kitabnya diturunkan bagi umat Yahudi dan Nasrani. Tetapi, agama dan kitab-kitab tersebut pada dasarnya bebas dari kesyirikan. Karena asal mula agama *ahlul kitab* tidak ada ajaran tentang syirik, melainkan ajaran tauhid. Untuk itu, bagi orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang kemudian mempersekutukan Allah, maka mereka dapat digolongkan

kepada orang-orang musyrik, bukan *ahl al-kitab*.¹¹ Dalam kitab “*Majmu’ Fatāwa*”,⁹⁹ Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa asal mula *abli kitab* tidak ada ajaran syirik. Karena Allah mengutus para nabi dengan ajaran tauhid. Semua yang beriman kepada para utusan Allah dan kitab yang diturunkannya, tidak mengenal adanya ajaran syirik di dalam ajaran aslinya. Namun, orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikannya ajaran syirik. Dengan demikian, mereka harus dibedakan sebagai orang-orang *musyrik*. Sebelum terjadi penghapusan dan penyimpangan kitab, maka mereka dalam keadaan beriman.

Berdasarkan pendapatnya di atas, dapat dipahami orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk dalam kategori *ahl al-kitab* menurut Ibnu Taimiyyah adalah mereka yang kitab-kitabnya masih asli, tidak ada ajaran *syirik* di dalamnya. Untuk itu, dapat diperoleh pemahaman umum bahwa karena kedua agama tersebut telah melakukan perombakan dan penggantian ajaran aslinya, maka menurut Ibnu Taimiyyah, mereka bukan lagi masuk dalam cakupan *ahl al-kitab*, melainkan sebagai orang-orang musyrik. Sedangkan menurut pendapat jumbuh ulama, orang Yahudi dan Nasrani yang telah berbuat musyrik juga masuk dalam kategori *ahl al-kitab*.

Terkait dengan hukum menikahi wanita *ahl al-kitab*, Ibnu Taimiyyah juga merujuk pada ketentuan Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 5. Bolehnya menikahi wanita *ahl al-kitab* menurut Ibnu Taimiyyah merujuk pada ketentuan ayat tersebut. Namun demikian, wanita *ahl al-kitab* yang dibolehkan dinikahi ini berbeda dengan wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi, yaitu wanita yang telah mempersekutukan Allah. Sebagaimana dimaksudkan dalam surat al-Baqarah ayat 221.

Ketentuan ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah telah dikhususkan oleh surat al-Maidah yang turunnya lebih akhir. Untuk itu, menikahi wanita *ahl al-kitab* dibolehkan.¹⁰² Pertanyaan yang timbul kemudian yaitu apakah kebolehan

menikahi wanita *ahl al- kitab* tersebut hanya berlaku terhadap wanita *ahl al-kitab* yang belum ada penggantian dan penyimpangan ajarannya, atau tercakup juga setelah penggantian dan penyimpangan ajarannya? Dalam hal ini, tentu dikembalikan kepada makna *ahlul kitāb* seperti telah disebutkan Ibnu Taimiyah di atas. Di mana, menurutnya wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang telah menyimpang dan mempersekutukan Allah masuk kategori orang-orang musyrik, bukan *ahl al-kitab*.¹⁰³ Sehingga, hukum menikahinya berlaku ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu diharamkan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyyah memandang hukum menikahi wanita *ahlul kitāb* adalah tetap boleh. Namun dengan batasan di mana berlakunya hukum boleh tersebut yaitu untuk wanita-wanita ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang tidak mempersekutukan Allah. Untuk itu, bagi wanita yang mempersekutukan Allah, meskipun ia beragama Yahudi atau Nasrani, tidak bisa dinikahi, karena mereka termasuk sebagai orang-orang musyrik.

Penetapan hukum boleh tidaknya menikahi wanita *ahl al-kitab* harus dikembalikan kepada ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Namun, perbedaan dalam memaknai maksud *ahl al-kitab* justru berujung pada berbedanya produk hukum yang dikeluarkan. Hal ini terlihat jelas seperti pendapat Ibnu Taimiyyah, yang hanya memaknai wanita *ahl al-kitab* sebagai wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani sebelum adanya penggantian ajaran kitab suci mereka. Pendapat yang ditetapkan Ibnu Taimiyyah ini justru memiliki landasan hukum tersendiri, serta metode penemuan hukumnya.

Jika dicermati pendapat Ibnu Taimiyyah, penetapan hukum menikahi wanita *ahl al-kitab* erat kaitannya dengan ketentuan dua ayat Al-Qur'an, yaitu surat al-Baqarah ayat 223 dan surat al-Maidah ayat 5. Surat al-Baqarah menjelaskan tentang larangan menikahi wanita *musyrik*. Berdasarkan ayat

tersebut, jelas bahwa terdapat larangan menikahi wanita musyrik sebelum ia beriman. Namun, dalam kaitannya dengan ketentuan surat al-Maidah ayat 5 (telah dikutip sebelumnya), menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah wanita *ahl al-kitab* masuk dalam cakupan orang-orang musyrik atau tidak. Dalam hal ini, ia memberikan tiga jawaban yang biasanya digunakan oleh para ulama. Dalam tiga jawaban tersebut, Ibnu Taimiyah lebih condong pada salah satu jawaban hukum dari ketiga jawaban yang ada.

Sementara itu, kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab, menurut Rasyid Ridha hanya berlaku bagi pria muslim yang kuat imannya dan teguh keyakinannya. Jadi, bagi yang tidak mantap keimanannya, maka tidak boleh bagi pria muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab. Karena, bisa jadi dia akan terjerumus dan terpengaruh dengan wanita tersebut yang pada akhirnya dia pindah keyakinan dengan masuk agama wanita itu. Jadi, di sini Rasyid Ridha sangat menekankan tindakan preventif. Adapun dihalalkannya menikah dengan wanita Ahli Kitab tujuannya adalah untuk memperlihatkan sifat kasih sayang kepada mereka, supaya mereka bisa melihat keindahan mu'amalah umat Islam dan kemudahan syari'at-Nya. Hal ini bisa terwujud dengan melakukan pernikahan dengan wanita mereka. Karena, laki-laki adalah pemegang otoritas dan kekuasaan terhadap wanita. Jika mu'amalah sang suami (pria muslim) bagus terhadap sang istri (wanita *ahl al-kitab*), maka itu adalah pertanda bahwa agama yang dianut sang suami adalah agama yang mengajak kepada kebenaran dan ke jalan yang lurus, agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bersikap adil kepada sesama muslim dan non muslim, agama yang mengajarkan lapang dada dalam bermu'amalah dengan orang-orang yang berbeda.

Orang-orang *musyrik* sebagaimana dituangkan dalam surat al-Baqarah ayat 221 sebelumnya dalam pengertian Ibnu Taimiyyah termasuk wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) yang telah membuat kesyirikan. Dalam hal ini, wanita *ahlul*

kitab disebutkan sebagai wanita musyrik bukan dengan *isim* (penamaan/kata benda), tetapi penyebutannya dengan *fi'il* (kata kerja).¹⁰⁵ Artinya, *ahl al-kitab* merupakan nama tersendiri dan musyrik juga nama tersendiri. Untuk itu, wanita *ahl al-kitab* tidak disebut sebagai wanita musyrik, akan tetapi mereka dikatakan musyrik karena perbuatannya yang mempersekutukan Allah. Ketika *ahl al-kitab* berbuat syirik, maka *ahl al-kitab* (yang berbuat syirik) ini masuk dan disifatkan sebagai orang-orang musyrik.

Disebutkan bahwa surat al-Maidah ayat 5 telah menghapus ketentuan surat al-Baqarah ayat 221. Oleh karena itu, ayat yang terakhir turun menghapus ayat sebelumnya ketika ada pertentangan hukum. Namun, ditegaskan kembali oleh Ibnu Taimiyah, di mana awal mula *ahlul kitab* ini berada dalam keimanan, tetapi mereka (disifati sebagai orang musyrik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya) menjadi kafir. Hal ini merujuk pada ketentuan surat al-Nisa' ayat 150-151. Ayat tersebut memberi penegasan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani (*ahlul kitab*) merupakan orang-orang kafir. Sementara pada ayat lainnya, justru ditegaskan bahwa menikahi wanita kafir dilarang. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat al-Mumtahanah ayat 10.

Berdasarkan penjelasan berikut dengan kutipan beberapa ayat, maka dapat diketahui bahwa Ibnu Taimiyah lebih condong memahami bahwa surat al-Baqarah ayat 221 tentang wanita musyrik bersifat umum, ini berarti wanita *ahl al-kitab* masuk dalam kategori wanita musyrik. Akan tetapi, ketentuan ayat tersebut kemudian dikhususkan dengan adanya ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Meskipun wanita *ahlul kitab* dikhususkan, tetapi beliau membedakan wanita *ahl al-kitab* yang menyimpang dengan wanita *ahl al-kitab* yang masih menjalankan ajaran asli kitab suci mereka.

Rasyid Ridha menafsirkan surat al-Baqarah ayat 221 tersebut dengan menyatakan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim dalam surat al-Baqarah ayat

221 di atas adalah wanita musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci sebagai pedoman untuk dibaca/dianut. Karena, seluruh riwayat terkait ayat ini memang mengarah ke pemahaman itu. Adapun orang-orang yang memiliki kitab suci tidak termasuk dalam kategori musyrik dan secara spontan telah keluar dari hukum pengharaman. Apakah masih ada sampai sekarang orang-orang musyrik Arab itu? Kalau ada, maka hukum tetap berlaku. Tetapi apabila tidak ada, maka dengan sendirinya tidak ada satu kepercayaan dan agama pun yang menjadi kendala dalam melakukan pernikahan.¹² Penafsiran kata "*musyrikat*" dalam ayat 221 surat al-Baqarah tersebut dengan musyrik Arab, menurut Rasyid Ridha adalah pendapat yang sudah disepakati dan didukung oleh *syaiikh al-mufasssin*, maha guru Ibnu Jarir al-Thabari sebagaimana yang dia tuangkan di dalam kitab tafsirnya.

Rasyid Ridha juga menegaskan bahwa ayat tersebut (pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik) tidak pernah menganulir ayat apapun, seperti ayat 5 Surat al-Maidah yang membolehkan nikah dengan wanita *ahl al-kitab*. Rasyid Ridha menganggap sangat tidak logis kalau ayat yang datangnya duluan menganulir ketentuan ayat yang datangnya belakangan.¹³ Pernyataan Rasyid Ridha sangat jelas sekali mengharamkan pria muslim menikah dengan wanita musyrik (musyrik Mekah). Alasan dari pengharaman tersebut kata Rasyid Ridha adalah karena orang musyrik merupakan faktor yang bisa menjerumuskan atau mengajak pria muslim ke dalam api neraka, baik dengan perkataan atau perbuatan mereka. Maka, menjalin kasih dengan mereka dalam bentuk pernikahan merupakan faktor terbesar yang bisa mewujudkan kehinaan masuk neraka itu. Rasyid Ridha kembali menegaskan dengan bersumpah bahwa menikahi wanita hamba sahaya yang beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW jauh lebih bagus dibanding menikahi wanita musyrik yang cantik jelita. Karena, wanita musyrik

tersebut tidak mempunyai pedoman yang bisa dijadikan sebagai prinsip dalam kehidupan agar terbiasa dengan kebaikan dan menjauhi keburukan dan kemungkaran. Wanita musyrik tidak akan merasa berdosa ketika melakukan pengkhiantan kepada suaminya.

Jika dilihat dari sisi metodologi penafsiran Rasyid Ridha terhadap kata *musyrikah* tersebut, dia memakai pendekatan *al-‘ibrah bi khusûs al-sabab lâ bi ‘umûm al-lafẓhi*.³⁴ Oleh karena itu, dia memahami bahwa yang dimaksud dengan *musyrikah* dalam ayat itu adalah wanita musyrik Arab ketika al-Qur’an diturunkan. Makanya keharaman pernikahan hanya berlaku terhadap wanita musyrik Arab itu saja, bukan yang lainnya. Sementara al-Maraghi berpandangan bahwa *musyrikah* dalam ayat tersebut adalah *musyrikah* secara umum. Karena, dia memakai pendekatan *al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafẓhi lâ bi khusûs al-sabab*.³⁵ Oleh karena itu, al-Maraghi berpendapat bahwa haram hukumnya bagi pria muslim menikah dengan wanita musyrik. Keharamannya tidak hanya terbatas pada wanita musyrik Arab saja sebagaimana yang dikatakan oleh Rasyid Ridha, tapi termasuk semua wanita musyrik yang ada di dunia ini, kapan dan di manapun mereka berada.

Berdasarkan dalil-dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah, maka dapat dipahami cara ia menggali hukum (metode *istinbât* hukum). Metode penemuan hukum yang digunakan Ibnu Taimiyyah lebih kepada penalaran *bayani*. Metode *bayani* yaitu metode dalam menemukan hukum dengan melihat pada kaidah kebahasaan yang dimuat dalam Al-Qur’an.¹⁰⁸ Istilah lain dari metode *bayani* yaitu metode *lughawiyah*. Al Yasa’ Abubakar menyatakan bahwa metode *lughawiyah* yaitu penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan.¹⁰⁹ Namun, dalam tulisan ini penulis memilih istilah *bayani*. Metode *bayani* ini jika dilihat dalam literatur Ushul Fiqh sangat luas pembahasannya, yaitu mencakup kajian tentang

makna khusus (*ḵhaṣ*) dan makna umum (*‘ām*) suatu ayat, *nasakh*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, dan lain sebagainya.¹¹⁰

Sejauh amatan penulis, metode *bayani* yang digunakan Ibnu Taimiyyah lebih ditekankan pada kajian lafal *‘ām* (makna umum) dan lafal *ḵhaṣ* (makna khusus) dari ketentuan surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5. Ketentuan surat al-Maidah tersebut bukan menghapus (*nasakh*) ketentuan surat al-Baqarah sebagaimana penjelasan poin ketiga di atas, melainkan surat al-Maidah hanya bersifat khusus (*ḵhaṣ*), sedangkan surat al-Baqarah bersifat umum (*‘ām*).¹¹¹ Untuk itu hukum, menempatkan wanita *ahlul kitāb* pada posisi yang berbeda (dikhususkan) dengan wanita musyrik. Kekhususan ini terletak pada dibolehkannya laki-laki menikah dengan wanita *ahlul kitāb*.

Lebih lanjut, kekhususan boleh menikahi wanita *ahlul kitāb* tersebut tidak berhenti pada ranah hukum menikah saja, tetapi menurut Ibnu Taimiyyah, mereka (*ahlul kitāb*) harus dilihat pada ada tidaknya penyimpangan ajaran kitab yang diturunkan kepada mereka. Jika ada penyimpangan, maka *ahlul kitāb* dalam makna ini tidak diperbolehkan untuk dinikahi, karena secara hukum mereka telah mengerjakan apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik secara umum, yaitu mempersekutukan Allah.

Atas dasar penemuan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Ibnu Taimiyyah, hukum menikahi wanita *ahlul kitāb* masih berlaku, tetapi berlakunya bagi wanita-wanita *ahlul kitāb* yang belum menyimpang dari ketentuan ajaran asli kitab-kitab mereka. Jika kenyataannya telah menyimpang, seperti dapat dibuktikan dewasa ini, maka berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah wanita tersebut tidak masuk dalam wanita *ahlul kitāb* yang diperbolehkan untuk dinikahi.

KESIMPULAN

Dalil hukum yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum menikahi wanita *ahl kitab* merujuk pada ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Pendapatnya yaitu laki-laki boleh menikahi wanita *ahl kitab* yang tidak mengerjakan kesyirikan. Namun, wanita *ahl al-kitab* yang perbuatannya terbukti syirik (mempersekutukan Allah), maka mereka masuk dalam cakupan makna surat al-Baqarah ayat 221, yaitu orang-orang musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Adapun metode *istinbāt* yang digunakan Imam Ibnu Taimiyyah yaitu metode *bayyānī*. Di mana, ketentuan surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus (*khaṣ*), dan surat al-Baqarah ayat 221 bersifat umum (*‘ām*). Untuk itu, ketentuan surat al-Maidah tentang bolehnya menikahi wanita ahlul kitab masih berlaku, tetapi ahlul kitab di sini dikhususkan hanya wanita Yahudi dan Nasrani yang tidak mengerjakan perbuatan syirik.

Sementara itu, menurut Rasyid Ridha, pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik tidak pernah menganulir ayat apapun, seperti ayat 5 Surat al-Maidah yang membolehkan nikah dengan wanita *ahl al-kitab*. Rasyid Ridha menganggap sangat tidak logis kalau ayat yang datangnya duluan menganulir ketentuan ayat yang datangnya belakangan. Berdasarkan konsep Rasyid Ridha terhadap makna *ahli al-kitab* ini, tentu saja dia membolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita *ahli al-kitab*. Kebolehan ini tidak hanya dengan wanita Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga dengan wanita Majusi, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, dan penganut agama lainnya yang memiliki kitab suci. Menurut Rasyid Ridha, tidak ada perbedaan yang besar antara wanita Ahli Kitab dengan orang mukmin. Karena, wanita Ahli Kitab juga beriman kepada Allah SWT dan menyembahnya beriman kepada para nabi dan hari akhir serta balasannya, meyakini kewajiban berperilaku baik dan keharaman berbuat jahat.

Uup Gufron, M.Ud, Dosen Agama UNINDRA Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subūl al-Salām*, dan Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjany, *Kitabal-Ta'rifāt*, dimuat dalam Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Galib, " *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*", (Jakarta: Paramadina 1998)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Dimuat dalam web: <https://idtesis.com/analisis-fatwa-mui-nomor-4munas-viimui82005-tentang-perkawinan-beda-agama/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2018.
- Salma Zuhriyah, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2002)
- Muhammad, *Fikih Empat Madhab*, terj. Abdullah Zak, cet. 2 (Bandung Hasyimi Press, 2004)
- Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, " *Majmu Fatawa tentang Nikah*", (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqū min Ighāṣah al-Lahfān fī Maṣāyid al-Syāitān*, ed. In, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan*, (terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), cet. 6, (Jakarta, Dar Ibnul Jauzi, 2005)
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1947)
- Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, " *Majmu Fatawa tentang Nikah*", (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)

Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, hlm. 161.
Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1947)

Catatan Kaki:

¹Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subul al-Salām*, dan Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjany, *Kitābal-Ta'rifāt*, dimuat dalam Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 7

² Galib, "Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya", (Jakarta: Paramadina 1998), hal. 21

³
⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Dimuat dalam web: <https://idtesis.com/analisis-fatwa-mui-nomor-4munas-viimui82005-tentang-perkawinan-beda-agama/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

⁵Salma Zuhriyah, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2002). hal. 34

⁶Muhammad, *Fikih Empat Madhab*, terj. Abdullah Zak, cet. 2 (Bandung Hasyimi Press, 2004), hal. 45

⁷Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Qasim), ed. In, "Majmu Fatāwa tentang Nikah", (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 160.

⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqā min Ighāṣah al-Lahfān fī Maṣāyid al-Syāitān*, ed. In, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan*, (terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), cet. 6, (Jakarta, Dar Ibnul Jauzi, 2005), hlm. 423-435.

⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1947), Cet. I, Juz II, h. 281

¹⁰Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Qasim), ed. In, "Majmu Fatāwa tentang Nikah", (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 161.

¹¹Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, hlm. 161.

¹²Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1947), Cet. I, Juz II, h. 281

¹³ Ibid, Juz IV, hal. 158